

## **Determinan *Audit Fee* Pada Badan Usaha Milik Negara Tahun 2022-2024**

**Yusrina Nirmalasari<sup>1</sup>, Achmad Zaky<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*

*Correspondence: yusrina.nirmala@gmail.com*

### **Abstract**

This study aims to examine the relationship between audit fees in Indonesian state-owned enterprises (SOEs), audit committee size, business complexity, company size, and public accounting firm size. This analysis uses only SOEs officially registered on the SOE website. Annual reports and financial statements covering 2022–2024 are among the secondary sources used to collect data. The analytical method used is panel data regression. Hypotheses are tested using multiple linear regression after model selection and classical assumption testing. Audit fees are not affected by audit committee size or firm complexity. Audit fees are found to be higher for larger organizations and those with higher PAF. These results indicate that audit fees in SOEs are not always determined by the level of company complexity or the existence of an audit committee. Business size and the credibility and competence of the public accounting firm have a more significant impact on audit fees. Due to broader audit coverage, larger transaction volumes, and higher professional risk faced by auditors, large companies and the size of the public accounting firm often charge higher audit fees.

**Keywords:** Audit Committee; Audit Fee; Firm Complexity; Firm Size; Public Accounting Firm Size.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara biaya audit pada BUMN Indonesia, ukuran komite audit, kompleksitas bisnis, ukuran perusahaan, dan ukuran firma akuntansi publik. Dalam analisis ini, hanya BUMN yang terdaftar secara resmi di situs web BUMN yang digunakan. Laporan tahunan dan laporan keuangan yang mencakup tahun 2022–2024 termasuk di antara sumber sekunder yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hipotesis diuji menggunakan regresi linier berganda setelah pemilihan model dan pengujian asumsi klasik. Biaya audit

tidak dipengaruhi oleh ukuran komite audit atau kompleksitas perusahaan. Biaya audit ditemukan lebih besar untuk organisasi yang lebih besar dan yang memiliki KAP yang lebih besar. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya *audit fee* di BUMN tidak selalu ditentukan oleh tingkat kompleksitas perusahaan atau keberadaan komite audit. Ukuran bisnis dan kredibilitas serta kompetensi KAP memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap *audit fee*. Karena cakupan audit yang lebih luas, volume transaksi yang lebih besar, dan risiko profesional yang lebih tinggi yang dihadapi oleh auditor, perusahaan besar dan ukuran KAP sering menetapkan *audit fee* yang lebih tinggi.

**Kata Kunci:** *Audit Fee*; Komite Audit; Kompleksitas Perusahaan; Ukuran Kantor Akuntan Publik; Ukuran Perusahaan.

---

## Pendahuluan

*Audit fee* merupakan komponen penting dalam proses audit karena mencerminkan kompensasi atas jasa profesional auditor serta tingkat upaya, risiko, dan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan audit (Simunic, 1980). Di Indonesia, penentuan *audit fee* dilakukan berdasarkan kesepakatan antara auditor dan klien dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan, risiko penugasan, serta tanggung jawab profesional (IAPI, 2024). Oleh karena itu, *audit fee* tidak hanya merepresentasikan biaya jasa audit, tetapi juga sering dikaitkan dengan kualitas audit dan efektivitas pengawasan terhadap laporan keuangan (El-gammal, 2012).

Kebutuhan terhadap audit eksternal muncul akibat adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia (2022) menegaskan bahwa relevansi dan keandalan merupakan pilar utama laporan keuangan dalam mendukung keputusan ekonomi. Guna menjamin validitas parameter tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (2023) mengharuskan emiten untuk memublikasikan laporan keuangan yang telah tersertifikasi melalui pemeriksaan oleh audit eksternal. Dalam konteks ini, *audit fee* menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk menjamin keandalan laporan keuangan.

Dalam praktiknya, besaran *audit fee* menunjukkan variasi antar perusahaan maupun antar periode pelaporan yang cukup signifikan. Fenomena ini terlihat pada Badan Usaha Milik Negara selama periode 2022-2024. Sebagai ilustrasi, *audit fee* PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk meningkat dari Rp65,14 miliar menjadi Rp83,72 miliar. Sebaliknya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mengalami penurunan dari Rp3,54 miliar menjadi sekitar Rp1,12 miliar. Perbedaan pola ini juga

terjadi pada beberapa BUMN lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *audit fee* tidak bersifat stabil meskipun berada dalam lingkungan kepemilikan negara dan pengawasan publik yang tinggi. Secara akademik, kondisi ini mengindikasikan bahwa *audit fee* lebih dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, kompleksitas operasional, dan tingkat risiko audit.

Fenomena tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara *audit fee* dan kualitas pelaporan keuangan. Kasus dugaan adanya manipulasi laporan keuangan pada tahun 2023 yang terjadi pada PT Waskita Karya Tbk juga PT Wijaya Karya Tbk menunjukkan bahwa besarnya *audit fee* tidak selalu sejalan dengan keandalan laporan keuangan. Secara implisit, hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan biaya audit merupakan representasi dari integrasi berbagai faktor krusial. Selain mempertimbangkan standar kualitas, auditor juga mengalokasikan beban biaya berdasarkan profil risiko klien serta kompleksitas kebutuhan verifikasi dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Secara teoretis, variasi *audit fee* dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Dalam kerangka hubungan agensi, audit eksternal diimplementasikan sebagai upaya strategis untuk meminimalkan kesenjangan informasi antara agen dan prinsipal, sehingga konflik kepentingan dapat dimitigasi secara efektif (Jensen & Meckling, 1976). Selain itu, *audit pricing theory* menyatakan bahwa *audit fee* ditentukan oleh tingkat risiko audit dan besarnya upaya yang diperlukan auditor dalam melaksanakan penugasan (Simunic, 1980). Dengan demikian, *audit fee* mencerminkan kombinasi antara risiko, kompleksitas, dan kebutuhan prosedur audit.

Dalam penelitian ini, BUMN dipilih sebagai objek karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perusahaan non-BUMN. BUMN menjalankan peran ganda sebagai entitas bisnis dan penyedia layanan publik, sehingga berpotensi meningkatkan kompleksitas operasional dan risiko pengelolaan (Sitorus et al., 2025). Karakteristik tersebut menjadikan BUMN relevan sebagai konteks empiris untuk menguji determinan *audit fee*.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan, komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpotensi memengaruhi besaran *audit fee* (Drogalas et al., 2021; Syafii et al., 2022). Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan, khususnya pada variabel kompleksitas perusahaan dan komite audit yang dalam beberapa studi tidak berpengaruh terhadap *audit fee* (Harahap et al., 2022;

Novriansa et al., 2023). Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan objek perusahaan non-BUMN sehingga belum sepenuhnya menjelaskan fenomena penentuan *audit fee* pada perusahaan dengan karakteristik khusus seperti BUMN. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu *audit fee* masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada aspek empiris dan teoretis. Secara empiris, belum terdapat konsistensi hasil penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi *audit fee*, khususnya dalam konteks BUMN. Secara teoretis, penelitian terdahulu umumnya hanya menggunakan satu pendekatan teori, sehingga belum memberikan penjelasan yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan teori keagenan dan *audit pricing theory* untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian determinan *audit fee* pada perusahaan BUMN dalam periode pascapandemi tahun 2022-2024 dengan pendekatan integratif dua teori. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka konseptual terkait *audit fee* sekaligus mendiversifikasi temuan empiris dalam konteks perusahaan dengan tingkat kerumitan tinggi. Fokus utama diberikan pada organisasi yang tunduk pada pengawasan ketat oleh masyarakat dan otoritas terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompleksitas suatu perusahaan, komite audit, ukuran suatu perusahaan, dan ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit fee* pada perusahaan BUMN periode 2022-2024 dengan pendekatan kuantitatif menggunakan regresi data panel serta analisis regresi linier berganda setelah melalui uji pemilihan model dan uji asumsi klasik.

## Telaah Literatur

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori Penetapan Harga Audit (*Audit Pricing Theory*)**

Berdasarkan perspektif teori agensi, asimetri perolehan informasi antara manajemen dan pemegang saham sering kali memicu terjadinya benturan kepentingan. Hal ini disebabkan oleh posisi manajer sebagai agen yang menguasai data internal lebih mendalam daripada pihak *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Adanya fenomena ini mengharuskan adanya kerangka *monitoring* yang efektif untuk memvalidasi akurasi serta integritas penyajian laporan keuangan agar terbebas dari bias manajerial. Audit eksternal berperan sebagai mekanisme *monitoring* yang independen dalam mengurangi risiko perilaku oportunistik manajemen.

Teori penetapan harga audit menyatakan bahwa besaran *audit fee* ditentukan oleh tingkat risiko audit dan upaya yang diperlukan auditor dalam melaksanakan penugasan (Simunic, 1980). Dalam konteks hubungan keagenan, peningkatan asimetri informasi akan meningkatkan risiko audit, sehingga auditor perlu memperluas prosedur pemeriksaan. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya waktu, tenaga, dan sumber daya yang digunakan, yang pada akhirnya tercermin dalam besaran *audit fee*. Dengan demikian, teori keagenan dan teori penetapan harga audit memiliki keterkaitan, di mana teori keagenan menjelaskan sumber risiko, sedangkan teori penetapan harga audit menjelaskan implikasi ekonomis dari risiko tersebut dalam bentuk *audit fee*.

## **Audit Fee**

*Audit fee* digunakan sebagai biaya monitoring dalam hubungan keagenan sekaligus kompensasi atas jasa audit yang mencerminkan tingkat risiko dan kompleksitas penugasan (Simunic, 1980). Dalam perspektif teori keagenan, *audit fee* muncul sebagai konsekuensi untuk mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi. Sementara itu, dalam teori penetapan harga audit, besaran *fee* ditentukan oleh intensitas prosedur audit yang diperlukan untuk merespons risiko. Oleh karena itu, *audit fee* dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan mekanisme tata kelola yang menentukan tingkat risiko dan kompleksitas audit.

## **Kompleksitas Perusahaan**

Kompleksitas perusahaan mencerminkan tingkat kerumitan aktivitas operasional dan transaksi yang terjadi dalam suatu entitas, yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti jumlah anak perusahaan, cabang usaha, serta keterlibatan dalam operasi lintas negara (Nisa & Triyanto, 2022). Dalam kebanyakan kasus, jumlah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki merupakan indikasi kompleksitas suatu perusahaan (Paramitha & Setyadi, 2022). Dalam perspektif teori keagenan, kompleksitas yang tinggi memperbesar asimetri informasi karena meningkatnya kesulitan bagi prinsipal dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas manajemen. Kondisi ini meningkatkan risiko audit yang harus dihadapi auditor. Selain itu, dalam kerangka teori penetapan harga audit, peningkatan kompleksitas mendorong auditor untuk memperluas cakupan pemeriksaan dan meningkatkan intensitas prosedur audit (Hapsari, 2020). Konsekuensinya, kebutuhan waktu dan sumber daya meningkat, sehingga berimplikasi pada peningkatan *audit fee*.

## **Komite Audit**

Komite audit berperan penting dalam tata kelola suatu perusahaan dengan memberikan nasihat kepada dewan komisaris mengenai kredibilitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan pelaksanaan audit eksternal (Ardani, 2017). Keberadaan komite audit juga diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015, yang menegaskan perannya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Berdasarkan kerangka teori agensi, komite audit diimplementasikan sebagai instrumen supervisi strategis yang bertujuan memitigasi benturan kepentingan sekaligus mereduksi kesenjangan informasi antara pihak manajemen dan pemilik modal (Effendi & Ulhaq, 2021). Selain itu, dalam kerangka teori penetapan harga audit, keberadaan komite audit dapat memengaruhi *audit fee*, dimana komite audit yang aktif cenderung meningkatkan tuntutan terhadap kualitas audit, sehingga auditor merespons dengan meningkatkan cakupan dan kedalaman prosedur audit, yang pada akhirnya dapat memengaruhi besaran *audit fee*.

## **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan menunjukkan cakupan aktivitas suatu perusahaan dan sering kali diukur menggunakan total aset perusahaan (Priyatama & Pratini, 2021). Diversifikasi aktivitas dan meluasnya celah antara pemilik modal dengan pengelola pada perusahaan besar secara teoretis memperlebar asimetri informasi, sebagaimana dipaparkan dalam perspektif teori keagenan. Sementara itu, dalam kerangka teori penetapan harga audit, perusahaan besar memiliki aktivitas bisnis dan jumlah transaksi yang lebih kompleks, sehingga menuntut pelaksanaan audit dengan cakupan yang lebih luas dan tingkat pemeriksaan yang lebih mendalam (Sunarsih et al., 2021). Kondisi ini mengharuskan auditor untuk memperluas intensitas pengujian serta keterlibatan sumber daya, sehingga memberikan pengaruh signifikan terhadap penentuan besaran biaya audit yang dibebankan.

## **Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Skala sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi representasi dari tingkat kapabilitas, ketersediaan aset intelektual, serta rekam jejak profesional yang dimiliki oleh auditor (Retnoningsih & Alfaidah, 2024). Dalam perspektif teori keagenan, pemanfaatan jasa KAP berskala besar diyakini mampu memperkuat optimisme para *stakeholders* atas validitas laporan keuangan, mengingat entitas tersebut kerap diidentikkan dengan standar audit yang lebih superior. Secara spesifik, KAP kategori *Big Four* memegang pengakuan internasional dan dipandang mampu menyajikan

hasil pemeriksaan yang berkualitas berkat penerapan protokol audit yang sangat ketat (Zein & Rahma, 2022). Merujuk pada teori penetapan harga, KAP bereputasi cenderung mengimplementasikan metodologi pemeriksaan yang lebih komprehensif serta mendayagunakan personel dengan spesialisasi tinggi, yang berdampak pada peningkatan mutu sekaligus beban biaya audit. Konsekuensinya, keterlibatan KAP berskala besar secara umum berkorelasi positif terhadap eskalasi imbalan jasa audit (*audit fee*) jika dikomparasikan dengan firma audit yang lebih kecil.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap *Audit Fee***

Dalam perspektif teori penetapan harga audit, kompleksitas perusahaan dapat meningkatkan risiko audit dan kebutuhan prosedur pemeriksaan yang lebih luas, sehingga auditor harus mengalokasikan waktu dan sumber daya yang lebih besar (Simunic, 1980). Pada BUMN, kompleksitas umumnya lebih tinggi karena keterlibatan dalam berbagai sektor strategis, kepemilikan entitas anak yang banyak, serta adanya penugasan pemerintah yang memperluas ruang lingkup operasional. Situasi ini memicu peningkatan probabilitas terjadinya salah saji material serta menambah kompleksitas dalam integrasi laporan keuangan konsolidasian, yang mengharuskan auditor untuk melaksanakan prosedur pengujian secara lebih komprehensif dan tersinkronisasi. Selain itu, dalam kerangka teori keagenan, kompleksitas BUMN juga memperbesar asimetri informasi tidak hanya antara manajemen dan pemilik, tetapi juga dengan publik sebagai pemangku kepentingan. Hal ini mendorong peningkatan *audit effort* yang secara langsung berdampak pada *audit fee* (Novriansa et al., 2023).

H1: Kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee*.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Fee***

Berdasarkan teori keagenan, komite audit memegang peranan krusial sebagai instrumen monitoring guna mengoptimalkan standar pelaporan keuangan dan memastikan efisiensi supervisi pada tahapan audit. (Jensen & Meckling, 1976). Dalam BUMN yang berada di bawah sorotan publik dan regulasi yang ketat, komite audit cenderung mendorong standar audit yang lebih tinggi guna menjaga akuntabilitas. Tekanan tersebut diwujudkan dalam permintaan prosedur audit yang lebih komprehensif, peningkatan cakupan pengujian, serta intensitas komunikasi yang lebih tinggi antara auditor dan pihak perusahaan (Ardani, 2017). Mekanisme ini menyebabkan auditor meningkatkan alokasi sumber daya, sehingga secara kausal berdampak pada peningkatan *audit fee*.

H2: Komite audit berpengaruh terhadap *audit fee*.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Fee***

Dalam teori penetapan harga audit, skala perusahaan yang luas secara linear berbanding lurus dengan intensitas volume transaksi yang harus diproses dan aktivitas operasional yang lebih luas, sehingga memperbesar cakupan audit yang harus dilakukan. Pada BUMN, ukuran perusahaan sering kali berkorelasi dengan peran strategis dalam perekonomian nasional, yang disertai dengan kompleksitas transaksi dan eksposur risiko yang lebih tinggi. Hal ini mengharuskan auditor untuk meningkatkan jumlah sampel, kedalaman pengujian, serta koordinasi lintas unit dalam proses audit. Ditinjau dari teori agensi, perusahaan besar biasanya menghadapi masalah kesenjangan informasi yang lebih besar, sehingga memerlukan audit eksternal sebagai alat pengawasan. Hal ini menyebabkan beban kerja auditor bertambah dan secara langsung memicu kenaikan biaya audit.

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee*.

### **Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *Audit Fee***

Menurut teori penentuan harga audit, kapasitas sebuah KAP menjadi indikator perbedaan mutu layanan. KAP berskala besar biasanya didukung oleh ketersediaan sumber daya, metodologi kerja, serta prosedur kontrol kualitas yang lebih baik, sehingga mampu menangani penugasan audit yang kompleks (Zein & Rahma, 2022). BUMN umumnya memilih KAP besar untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan mereka di mata publik dan regulator. Melalui perspektif teori agensi, penggunaan jasa KAP bereputasi merupakan bentuk sinyal dari perusahaan untuk menekan ketimpangan informasi serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. Di sisi lain, KAP besar memikul risiko nama baik dan tuntutan hukum yang lebih berat. Kondisi ini membuat mereka menetapkan tarif audit yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas penanggungungan risiko tersebut. Oleh sebab itu, secara logis terdapat keterkaitan antara besarnya ukuran KAP dengan nominal biaya audit yang dibebankan kepada klien.

H4: Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *audit fee*.

## **Metode Penelitian**

Studi ini menerapkan metodologi kuantitatif guna melakukan pembuktian empiris terhadap berbagai faktor yang memengaruhi besaran biaya audit pada entitas BUMN. Penggunaan desain kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan keterkaitan sebab-akibat antarvariabel melalui proses uji hipotesis. Pendekatan ini memungkinkan

perolehan hasil yang terukur dan objektif dengan memanfaatkan data angka sebagai basis analisisnya. Di samping itu, metode ini dianggap selaras untuk mengevaluasi kembali konsistensi teori-teori terdahulu terkait variabel penentu harga audit, khususnya dalam lingkup organisasi sektor publik dan perusahaan berskala besar.

Pemilihan BUMN sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik unik yang dimiliki, yaitu kombinasi antara orientasi bisnis dan tanggung jawab publik. BUMN memiliki kompleksitas tata kelola yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta karena adanya keterlibatan pemerintah, regulasi yang ketat, serta tuntutan transparansi yang lebih besar. Kondisi ini menjadikan BUMN sebagai konteks yang relevan untuk menguji determinan *audit fee*, khususnya terkait kompleksitas organisasi, efektivitas pengawasan, dan reputasi auditor. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berbasis pada data sekunder yang diperoleh melalui literatur publik, khususnya laporan keuangan serta laporan tahunan resmi perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling* berdasarkan serangkaian kriteria yang dirinci dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Entitas BUMN yang tercatat secara resmi dalam pangkalan data laman bumn.go.id	64
2.	Entitas BUMN yang tidak menyediakan laporan tahunan maupun laporan keuangan secara lengkap selama periode 2022-2024	(31)
3.	Entitas BUMN dengan keterbatasan kelengkapan data terkait variabel-variabel yang dibutuhkan dalam analisis penelitian ini	(4)
Jumlah Sampel (N)		29
Jumlah Tahun Penelitian (t)		3
Jumlah Observasi (N x t)		87

Sumber : Data diolah, 2026

Analisis data dalam studi ini dioperasikan melalui software EViews dengan menerapkan teknik regresi data panel. Penggunaan model panel didasarkan pada kemampuannya dalam mengintegrasikan dimensi cross-section dan time series, yang secara langsung memperluas basis observasi serta memperkuat kekuatan statistik model. Keunggulan lain dari pendekatan ini adalah kemampuannya dalam mengakomodasi heterogenitas antar-individu yang bersifat tidak terobservasi. Tahapan estimasi diawali dengan serangkaian pengujian guna menyeleksi model yang paling representatif di antara Common Effect Model (CEM), Fixed

Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Penentuan ini melibatkan uji Chow guna membedakan antara CEM dan FEM, uji Hausman untuk mengevaluasi kesesuaian FEM terhadap REM, serta uji Lagrange Multiplier sebagai pembandingan antara CEM dan REM. Prosedur seleksi ini krusial untuk menjamin perolehan parameter estimasi yang efisien dan objektif (tidak bias). Adapun rumusan model regresi yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini disusun dalam persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

$Y = \text{Audit Fee}$

$\alpha = \text{Konstanta}$

$\beta_1 = \text{Koefisien Regresi Kompleksitas Perusahaan}$

$X_1 = \text{Kompleksitas Perusahaan}$

$\beta_2 = \text{Koefisien Regresi Komite Audit}$

$X_2 = \text{Komite Audit}$

$\beta_3 = \text{Koefisien Regresi Ukuran Perusahaan}$

$X_3 = \text{Ukuran Perusahaan}$

$\beta_4 = \text{Koefisien Regresi Ukuran KAP}$

$X_4 = \text{Ukuran KAP}$

$e = \text{Error Term}$

## **Pengukuran Variabel**

### ***Audit Fee***

Simunic (1980) mendefinisikan *audit fee* sebagai kompensasi bagi auditor atas jasa pemeriksaan laporan keuangan. Variabel ini diproksikan dengan logaritma natural dari nominal biaya audit dalam laporan tahunan guna mengurangi skewness dan meningkatkan normalitas distribusi data, sehingga hasil estimasi menjadi lebih stabil.

$$\text{Audit Fee} = \text{Ln} (\text{Fee Audit}).$$

### ***Kompleksitas Perusahaan***

Kompleksitas perusahaan diproksikan melalui jumlah entitas anak yang dimiliki pada akhir periode pelaporan. Jumlah anak perusahaan mencerminkan tingkat kerumitan struktur organisasi, diversifikasi operasional, serta luasnya cakupan audit yang harus dilakukan auditor (Immanuel & Yuyetta, 2014). Semakin kompleks perusahaan, semakin tinggi potensi peningkatan *audit fee*.

$$\text{Kompleksitas Perusahaan} = \text{Jumlah Subsidiaries.}$$

### **Komite Audit**

Pengukuran komite audit dilakukan dengan menjumlahkan seluruh agenda rapat yang terlaksana selama periode pelaporan. Frekuensi rapat digunakan sebagai indikator aktivitas dan keterlibatan komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan. Semakin sering rapat dilakukan, diasumsikan semakin tinggi intensitas monitoring terhadap pelaporan keuangan dan pengendalian internal (Drogalas et al., 2021).

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Rapat Komite Audit.}$$

### **Ukuran Perusahaan**

Variabel ukuran perusahaan diproksikan melalui nilai logaritma natural dari total aset yang dimiliki. Transformasi ke dalam bentuk logaritma ini dilakukan guna meminimalkan variasi skala yang ekstrem di antara sampel perusahaan sekaligus memperbaiki distribusi normalitas data dalam model penelitian. Total aset mencerminkan besarnya sumber daya yang dikelola dan kompleksitas aktivitas perusahaan (Priyatama & Pratini, 2021).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset}).$$

### **Ukuran KAP**

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) diproksikan menggunakan skala ordinal, yaitu nilai 3 untuk *Big Four*, 2 untuk *Big Ten*, dan 1 untuk *Non-Big Ten*. Klasifikasi ini didasarkan pada reputasi, kapasitas sumber daya, serta standar audit yang diterapkan oleh masing-masing kelompok KAP. Penggunaan skala ordinal memungkinkan diferensiasi tingkat kualitas audit, namun memiliki keterbatasan karena mengasumsikan jarak yang sama antar kategori dan tidak menangkap variasi kualitas di dalam kelompok yang sama.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Tujuan penggunaan statistik deskriptif adalah untuk memberikan ringkasan dari variabel-variabel penelitian.

**Tabel 2.** Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompleksitas Perusahaan ( $X_1$ )	87	1.00	18.00	7.39	4.77
Komite Audit ( $X_2$ )	87	7.00	152.00	28.95	23.81

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan (X <sub>3</sub> )	87	27.33	35.43	31.89	2.02
Ukuran KAP (X <sub>4</sub> )	87	1.00	3.00	1.78	0.81
<i>Audit Fee</i> (Y)	87	19.58	25.15	22.06	1.58

Sumber : Hasil olah data eviews, 2026

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki variasi yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Rata-rata kompleksitas perusahaan (X<sub>1</sub>) sebesar 7,39 dengan deviasi standar yang relatif tinggi mengindikasikan heterogenitas jumlah entitas anak dalam sampel. Hal ini mencerminkan bahwa karakteristik struktur organisasi perusahaan tidak homogen, sehingga secara teoritis berpotensi menghasilkan variasi kebutuhan audit. Variabel komite audit (X<sub>2</sub>) memiliki sebaran yang sangat lebar, yang mengindikasikan perbedaan intensitas aktivitas pengawasan antar perusahaan. Namun, variasi yang tinggi ini juga mengisyaratkan bahwa frekuensi rapat belum tentu mencerminkan efektivitas pengawasan. Ukuran perusahaan (X<sub>3</sub>) menunjukkan deviasi yang relatif kecil, yang berarti karakteristik ukuran perusahaan dalam sampel cenderung homogen. Hal ini penting secara ekonometrik karena variabel dengan variabilitas rendah biasanya memiliki stabilitas pengaruh yang lebih kuat dalam model regresi. Sementara itu, ukuran KAP (X<sub>4</sub>) dan audit fee (Y) menunjukkan distribusi yang cukup stabil. Secara keseluruhan, pola ini mengonfirmasi bahwa data memiliki penyebaran yang memadai dan tidak terkonsentrasi pada nilai tertentu, sehingga layak digunakan dalam analisis inferensial.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk memastikan variabel penelitian memiliki distribusi normal. Melalui uji Jarque-Bera, asumsi normalitas terpenuhi jika hasil perhitungan menunjukkan nilai probabilitas di atas 0,05.

**Tabel 3.** Hasil Uji Normalitas

<i>Jarque-Bera</i>	5.583051
<i>Probability</i>	0.061328

Sumber : Hasil olah data eviews, 2026

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa residual model terdistribusi normal (probabilitas > 0,05). Secara ekonometrik, kondisi ini penting karena memastikan bahwa estimasi parameter regresi tidak bias dan pengujian statistik (t dan F) dapat diinterpretasikan secara valid.

### **Uji Multikolinearitas**

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah mengidentifikasi adanya hubungan timbal balik antar variabel bebas. Suatu variabel dinyatakan bebas dari masalah ini apabila koefisien korelasinya berada di bawah ambang 0,90.

**Tabel 4.** Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Correlation</i>	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>
X <sub>1</sub>	1.000000			
X <sub>2</sub>	0.314976	1.000000		
X <sub>3</sub>	0.206538	0.638674	1.000000	
X <sub>4</sub>	0.209051	0.799234	0.821544	1.000000

Sumber : Hasil olah data eviews, 2026

Nilai korelasi antar variabel independen berada di bawah ambang batas, yang menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Implikasinya, masing-masing variabel independen mampu menjelaskan variasi *audit fee* secara relatif independen tanpa distorsi hubungan linier yang berlebihan. Hal ini memperkuat validitas model dalam mengidentifikasi pengaruh parsial masing-masing variabel.

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linier berganda diterapkan untuk mengestimasi dampak kompleksitas entitas, komite audit, serta skala perusahaan dan KAP terhadap *audit fee*. Tabel berikut menyajikan hasil analisis regresi.

**Tabel 5.** Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	5.735138	2.412551	2.377209	0.019800
Kompleksitas Perusahaan (X <sub>1</sub> )	-0.010018	0.026210	-0.382210	0.703300
Komite Audit (X <sub>2</sub> )	0.000010	0.002544	0.003749	0.997000
Ukuran Perusahaan (X <sub>3</sub> )	0.466608	0.080257	5.813901	0.000000
Ukuran KAP (X <sub>4</sub> )	0.686890	0.104593	6.567284	0.000000

Sumber : Hasil olah data eviews, 2026

Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh persamaan regresi linier:  
 $LN\text{Fee} = 5,73513 - 0,01001X_1 + 0,00001X_2 + 0,46660X_3 + 0,68689X_4 + e$

### Uji Hipotesis

#### Uji F

Evaluasi melalui uji F dilakukan untuk membuktikan signifikansi pengaruh kolektif dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ringkasan temuan statistik tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 6.** Hasil Uji F

<i>Prob(F-statistic)</i>	0.0000
--------------------------	--------

Sumber : Hasil olah data eviews, 2026

Merujuk pada luaran uji simultan, model yang diajukan dalam studi ini menunjukkan signifikansi secara statistik. Kondisi tersebut menandakan bahwa rangkaian variabel independen memiliki kapasitas untuk menjelaskan dinamika imbalan jasa audit secara bersama-sama. Hasil ini sekaligus menegaskan bahwa penentuan tarif audit merupakan implikasi dari interaksi berbagai faktor, baik karakteristik entitas maupun profil auditor.

#### Uji Koefisien determinasi

Daya penjelas model terhadap variasi variabel dependen diidentifikasi melalui angka koefisien determinasi ( $R^2$ ). Detail mengenai capaian angka tersebut dapat dicermati pada tabel berikut.

**Tabel 7.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	0.621554
------------------	----------

Sumber : Hasil olah data eviews, 2026

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,621 menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang cukup kuat. Secara ekonometrik, ini mengindikasikan bahwa variabel yang digunakan telah mampu menangkap sebagian besar determinan *audit fee*. Namun, masih terdapat sekitar 37,9% variasi yang dijelaskan oleh faktor lain.

#### Uji Statistik T

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat ditarik beberapa simpulan terkait pengujian hipotesis. Variabel kompleksitas entitas ( $X_1$ ) mencatatkan nilai signifikansi sebesar 0,703, yang berada di atas ambang batas 0,05, dengan demikian  $H_1$  ditolak karena tidak terbukti memengaruhi nominal imbalan jasa audit. Serupa dengan hal tersebut, variabel komite audit ( $X_2$ ) dengan tingkat probabilitas 0,997 ( $> 0,05$ )

menunjukkan ketiadaan dampak signifikan terhadap audit fee, sehingga H2 tidak mendapat dukungan empiris. Di sisi lain, variabel ukuran perusahaan (X3) terkonfirmasi memiliki pengaruh positif terhadap besaran biaya audit dengan nilai probabilitas 0,000 ( $< 0,05$ ), yang berarti H3 diterima. Terakhir, variabel ukuran KAP (X4) juga terbukti memberikan kontribusi positif terhadap nilai audit fee dengan perolehan probabilitas 0,000 ( $< 0,05$ ), sehingga H4 dinyatakan diterima.

### **Pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap *Audit Fee***

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak karena kompleksitas perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit fee*. Berdasarkan hasil uji, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,7033 ( $> 0,05$ ), yang mengindikasikan bahwa jumlah anak perusahaan sebagai indikator kompleksitas tidak berdampak signifikan pada penentuan besaran *audit fee* perusahaan. Dalam perspektif *Audit Pricing Theory*, kompleksitas seharusnya meningkatkan *audit effort* sehingga berdampak pada peningkatan *fee*. Namun, hasil empiris ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompleksitas struktural dan kompleksitas audit. Hal ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *risk-based audit*, di mana auditor tidak mendistribusikan upaya audit secara merata ke seluruh entitas anak, melainkan memfokuskan pada unit yang material dan berisiko tinggi.

Dalam konteks BUMN, struktur grup perusahaan umumnya berada dalam pengawasan regulator dan memiliki standar pelaporan yang relatif seragam. Kondisi ini berpotensi menurunkan variasi risiko antar entitas anak, sehingga jumlah anak perusahaan tidak secara langsung meningkatkan kompleksitas audit. Dari sudut pandang *Agency Theory*, kompleksitas perusahaan seharusnya meningkatkan asimetri informasi. Namun, pada BUMN, mekanisme pengawasan eksternal seperti regulasi pemerintah dan audit berlapis (internal dan eksternal) dapat menekan potensi konflik keagenan. Akibatnya, kompleksitas tidak menjadi sinyal risiko tambahan bagi auditor dalam menentukan *audit fee*. Selaras dengan penelitian Novriansa et al. (2023), penelitian ini membuktikan bahwa faktor kompleksitas entitas tidak memberikan dampak signifikan terhadap penetapan *audit fee*. Hal ini disebabkan karena auditor menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam menentukan ruang lingkup audit, sehingga tidak seluruh entitas anak memerlukan prosedur audit yang sama. Dengan demikian, kompleksitas perusahaan tidak selalu meningkatkan *audit fee*.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Fee***

Analisis data menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) tidak terbukti, yang berarti komite audit tidak memiliki kaitan signifikan dengan besaran *audit fee*. Temuan ini didukung oleh nilai probabilitas 0,9970 ( $>0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas pertemuan komite audit bukan merupakan faktor yang menentukan *audit fee*. Secara konseptual dalam *Agency Theory*, komite audit berperan sebagai mekanisme *monitoring* untuk mengurangi asimetri informasi. Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa indikator yang digunakan (frekuensi rapat) belum mampu menangkap kualitas pengawasan secara substantif. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan bias pengukuran, di mana kuantitas aktivitas tidak mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan.

Dari perspektif *Audit Pricing Theory*, auditor akan menyesuaikan *fee* berdasarkan risiko audit yang dirasakan. Jika aktivitas komite audit tidak memberikan sinyal penurunan risiko yang kredibel, maka variabel tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam penetapan *fee*. Dalam konteks BUMN, keberadaan komite audit cenderung bersifat *mandatory* dan mengikuti regulasi yang seragam. Hal ini menyebabkan rendahnya variasi kualitas antar perusahaan, sehingga auditor tidak melihat komite audit sebagai faktor pembeda dalam menilai risiko audit. Hasil penelitian ini memperkuat studi Harahap et al. (2022) bahwa keberadaan komite audit tidak menjadi determinan bagi *audit fee*. Hal ini disebabkan karena penentuan *audit fee* juga dipengaruhi oleh regulasi penetapan jasa audit serta ruang lingkup audit yang ditentukan auditor, sehingga aktivitas komite audit tidak secara langsung memengaruhi *audit fee*.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Fee***

Hasil pengujian pada hipotesis ketiga (H3) mencatatkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ( $< 0,05$ ), yang berarti H3 dinyatakan diterima. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan searah yang signifikan antara ukuran suatu perusahaan dengan besaran imbalan jasa audit. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa skala perusahaan secara linear akan diikuti oleh peningkatan biaya audit yang harus dialokasikan.

Dalam kerangka *Audit Pricing Theory*, ukuran perusahaan mencerminkan skala operasi, kompleksitas transaksi, dan eksposur risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, auditor membutuhkan *effort* yang lebih besar, baik dari sisi waktu, sumber daya, maupun prosedur audit, yang pada akhirnya meningkatkan *audit fee*. Berbeda dengan kompleksitas perusahaan yang tidak signifikan, ukuran perusahaan dalam penelitian ini mampu menangkap kompleksitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa

total aset atau skala perusahaan merupakan proksi yang lebih representatif terhadap *audit effort* dibandingkan jumlah entitas anak.

Dari perspektif *Agency Theory*, perusahaan besar pada umumnya memiliki tingkat pemisahan kepemilikan dan pengelolaan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan potensi konflik keagenan. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan mekanisme *monitoring* yang lebih intensif, termasuk audit eksternal yang lebih komprehensif, yang tercermin dalam *audit fee* yang lebih tinggi. Temuan ini menguatkan temuan Syafii et al. (2022) dan Fisabilillah et al. (2020), yang menemukan bahwa *audit fee* berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan. Untuk mengimbangi upaya audit mereka, auditor mengenakan biaya audit yang lebih tinggi kepada perusahaan yang berukuran lebih besar karena peningkatan risiko audit dan tanggung jawab auditor.

### **Pengaruh Ukuran KAP terhadap *Audit Fee***

Berdasarkan luaran uji statistik untuk hipotesis keempat (H4), ditemukan bahwa ukuran KAP yang lebih besar memiliki keterkaitan dengan pengenaan biaya audit yang lebih tinggi. Perolehan nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05, mendukung temuan tersebut. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pemilihan KAP dengan cakupan operasional yang lebih luas berkorelasi positif dengan besaran imbalan jasa audit yang dibebankan kepada klien.

Dalam perspektif *Audit Pricing Theory*, fenomena ini mencerminkan adanya *fee premium* yang dibebankan oleh KAP besar sebagai kompensasi atas kualitas audit, metodologi yang lebih ketat, serta risiko reputasi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, *audit fee* tidak hanya ditentukan oleh *effort*, tetapi juga oleh nilai reputasi (*reputational capital*) auditor. Dari sudut pandang *Agency Theory*, penggunaan KAP besar berfungsi sebagai mekanisme *signaling* untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemangku kepentingan. Perusahaan bersedia membayar *audit fee* yang lebih tinggi untuk memperoleh legitimasi dan mengurangi persepsi risiko. Dalam konteks BUMN, pemilihan KAP besar juga sering berkaitan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini memperkuat posisi KAP besar sebagai penyedia jasa audit dengan standar kualitas tinggi, yang secara langsung berdampak pada peningkatan *audit fee*. Temuan dalam penelitian ini memperkuat hasil studi yang dilakukan oleh Siregar et al. (2020) serta Retnoningsih & Alfidah (2024), yang menyatakan bahwa besaran imbalan jasa audit dipengaruhi secara signifikan oleh skala Kantor Akuntan Publik (KAP). Fenomena ini terjadi karena perusahaan memiliki kecenderungan untuk menunjuk KAP dengan reputasi besar guna menjamin kredibilitas laporan keuangan,

sehingga hal tersebut berdampak pada penetapan *audit fee* yang lebih tinggi sebagai konsekuensi dari jaminan kualitas yang diberikan.

### **Kesimpulan**

Menurut temuan empiris studi ini, *audit fee* di BUMN berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Jumlah komite audit dan kompleksitas organisasi tidak memengaruhi *audit fee*. Temuan ini menunjukkan bahwa *audit fee* pada BUMN lebih dipengaruhi oleh skala perusahaan dan karakteristik auditor dibandingkan dengan kompleksitas struktur perusahaan maupun mekanisme tata kelola internal. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran. Pertama, Disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut dengan jangka waktu yang lebih panjang guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Kedua, faktor-faktor lain termasuk risiko audit, profitabilitas, dan kualitas pengendalian internal dapat dimasukkan dalam studi di masa mendatang. Ketiga, pengukuran komite audit dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek keahlian, independensi, dan latar belakang profesional. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat mempertimbangkan faktor ukuran perusahaan dan pemilihan KAP dalam merencanakan *audit fee* secara lebih efektif.

### **Bibliografi**

- Ardani, S. V. (2017). Pengaruh Tenure Audit, Rotasi Audit, Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014). *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–12.
- Drogalas, G., Nerantzidis, M., Mitskinis, D., & Tampakoudis, I. (2021). The Relationship Between Audit Fees and Audit Committee Characteristics: Evidence from the Athens Stock Exchange. *International Journal of Disclosure and Governance*, 18, 24–41. <https://doi.org/10.1057/s41310-020-00088-9>
- Effendi, E., & Ulhaq, R. D. (2021). Pengaruh, Audit Tenure, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit ( Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 1475–1504. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v5i2.1411>
- El-gammal, W. (2012). Determinants of Audit Fees: Evidence from Lebanon. *International Business Research*, 5(11), 136–145. <https://doi.org/10.5539/ibr.v5n11p136>

- Fisabilillah, P. D., Fahria, R., & Praptiningsih. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan, dan Profitabilitas Klien Terhadap Audit Fee. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 361–372. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.388>
- Hapsari, R. P. D. (2020). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan, dan Ukuran Kantor Akuntansi Publik (KAP) Terhadap Audit Report Lag. *Journal Civics And Social Studies*, 4(2), 70–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.31980/journalcss.v4i2.132>
- Harahap, A. R., Siregar, S., & Nurlaila. (2022). Determinan of Audit Fee in Indonesia Islamic Bank. *Edukasi Isl Ami: Jurnal Pendi Di Kan Isl Am*, 11(3). <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3301>
- Immanuel, R., & Yuyetta, E. N. A. (2014). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Audit Fees (Studi Empirik Pada Perusahaan Manufaktur di BEI). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–12.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2022).
- Nisa, T. F., & Triyanto, D. N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan , Kompleksitas Erusahaan , Profitabilitas , Dan Komite Audit Terhadap Fee Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks Lq45 Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *E-Proceeding of Management*, 9(5), 3226–3232.
- Novriansa, A., Nurullah, A., Akbar, M., & Putra, P. (2023). Risk Management Committee , Company Complexity , Public Accounting Firm Size and Audit Fees. *SRIWIJAYA INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, 6(2), 359–370. <https://doi.org/https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i4.359-370>
- Paramitha, M. D., & Setyadi, E. J. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kompleksitas Perusahaan Terhadap Fee Audit (Studi pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 3(1), 11–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/ratio.v3i1.12840>

- Peraturan Dewan Pengurus (PDP) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit, Pub. L. No. 1210/IX/IAPI/2024 (2024).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (2015).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pub. L. No. 9 (2023).
- Priyatama, T., & Pratini, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Infrastruktur , Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 100–106. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i1.242>
- Retnoningsih, S., & Alfaidah, A. (2024). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Fee Auditor Eksternal. *Jurnal Sosio Dialektika*, 9(1), 171–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.31942/sd.v9i1.10997>
- Simunic, D. A. (1980). The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence. *Journal of Accounting Research*, 18(1), 161–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2490397>
- Siregar, S. F., Devi, Girsang, R. D., & Ginting, W. A. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP, Kompleksitas Audit, Audit Delay, dan Tipe Kepemilikan Terhadap Audit Fee. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3), 406–423. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jiab.v3i1.206>
- Sitorus, S. S., Arinda, G. Y., & Zein, A. W. (2025). Kinerja BUMN Dalam Menyediakan Barang dan Jasa Publik: Antara Fungsi Sosial dan Komersial. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15570418>
- Sunarsih, N. M., Munidewi, I. A. B., & Masdiari, N. K. M. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Audit, Opini Audit, Komite Audit Terhadap Audit Report Lag. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.1-13>
- Syafii, B. H., Hasanah, N., & Dewi, U. (2022). Are Firm Size, Firm

Complexity, and Managerial Ownership Able to Affect Audit Fee?:  
The Evidence in Philippines and Indonesia as Emerging Countries.  
*The Indonesian Accounting Review*, 12(2), 155–168.  
<https://doi.org/10.14414/tiar.v12i2.2560>

Zein, F., & Rahma, A. (2022). Peran Ukuran Perusahaan, Ukuran Kantor  
Akuntan Publik, dan Opini Uaidt Dalam Audit Delay. *Media Riset  
Akuntansi*, 12(2), 2088–2106.  
[https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal\\_MRA/article/download/2332/1737?](https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/download/2332/1737?)